

Daftar Pustaka

A. Buku-buku/Literatur

- Asikin Zainal, Wahab Agusfiar, Dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie Zaeni, 2008, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Babcoks Philip, 1999, *A Merriam Webster's Third New Internasional Dictionary Of The English Language Ua A Bridged*, U.S.A, Merriam Webster Inc, Publishers, Springfield, Massa Chusetts.
- Budiono Rachmad Abdul, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Husni Lalu, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Karim Furqon, 2001, *Mencari Konsep Upah Minimum Bagi Pekerja*, Suara Merdeka 22 Desember 2001
- Kertonegoro Sentanoe, 1999, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha Dan Pekerja (Bipartid) Dan Pemerintah (Tripartid)*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Legal Center Publising, 2008, *Peraturan Perundang- Undangan Upah & Pesangon*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publising.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rajagukgu HP 2000, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Codetermination)*, Makalah
- Suseno Magnis Frans, 1999, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Wijayanti Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 7 Tahun 2003 Tentang Upah Minimum

Keputusan Presiden RI No. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention (No.87) Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-201/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Organisasi Pekerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 226 Tahun 2000 Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum

C. Sumber Lain

Departemen P & K, *Kebumen Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

<http://www.antarane.ws.com/berita/409807/serikat-buruh-kecewa-hasil-penetapan-ump-lampung>

<http://istanasederhana.blogspot.com/2012/kedudukan-serikat-pekerja.dalam.html>

<http://penelitihukum.org/tag/pengertian-pekerja/http://lumbanjulubutar.mlblogs.com/2012/05/01/defenisi-serta-perbedaan-dan-persamaan-buruh-pekerja-karyawan/>

<http://ppmi-upawafer.wen.ru/page/c.html>

<http://rusdi123.wordpress.com/2009/09/15/dasar-hukum-tata-cara-pembentukan-serikat-pekerja/>

<https://herrypradana.wordpress.com/2013/02/27/studi-mengenai-penetapan-upah-minimum-provinsi-dengan-kaitannya-dengan-standar-kebutuhan-hidup-layak/>

<https://www.facebook.com/fsplemkspsiagn/posts/652020238189240>

<http://kspci.com/tentang-kspci-3/>

<http://www.kbsi.org/index.php/page/link/86/Profil>

https://www.facebook.com/SerikatBuruhLampung/info?tab=page_info

<http://buruhonline.com/artikel-908-dewan-pengupahan-dari-buruh-masihkahme-menuhi-syarat-me-wakili-buruh.html#ixzz3XONrLvXF>

<http://lampungx.com/2015/01/sah-umk-2015-hanya-93-persen-dari-khl/>